

BAB I

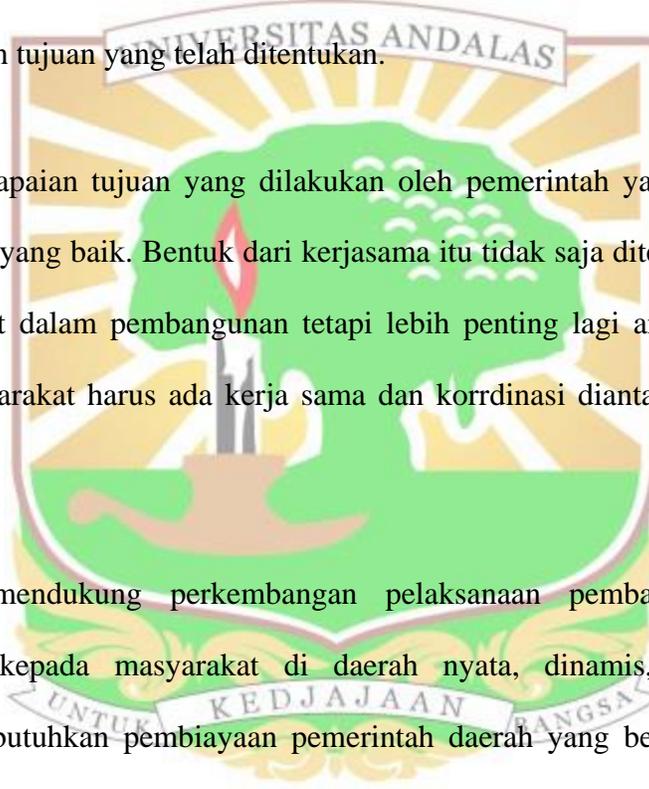
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan majunya perkembangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat Indonesia, dimana perekonomian masyarakat Indonesia berkembang dengan pesatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah yang maksimal diperlukan kerjasama yang baik. Bentuk dari kerjasama itu tidak saja ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi lebih penting lagi antara instansi pemerintah dan masyarakat harus ada kerja sama dan koordinasi diantara satu sama lainnya.

Dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat di daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dibutuhkan pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pemungutan atau iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan peraturan daerah (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.



Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah, contoh : PKB, BBNKB, PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air;
- b. Hasil Retribusi Daerah, contoh : Retribusi Pemakaian Tanah Provinsi (RPTP);
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Disahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat perlu karena kontribusinya sangat besar untuk negara. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota

Padang Tahun 2009-2013

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	2009	122.355.236.750	123.262.544.395	100,74
2.	2010	128.552.197.000	153.315.121.175	119,26
3.	2011	180.282.075.000	195.877.863.600	108,65
4.	2012	203.351.591.000	207.763.371.060	102,17
5.	2013	224.951.649.000	222.922.858.550	103.80

Sumber : *Dokumen Internal SAMSAT Kota Padang*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun berturut-turut kota Padang dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Mencermati latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kedalam bentuk tugas akhir dengan judul :

**”PROSEDUR PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH
SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang?
2. Apa saja hambatan dalam prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD SAMSAT Kota Padang?
3. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan hambatan prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD SAMSAT Kota Padang?

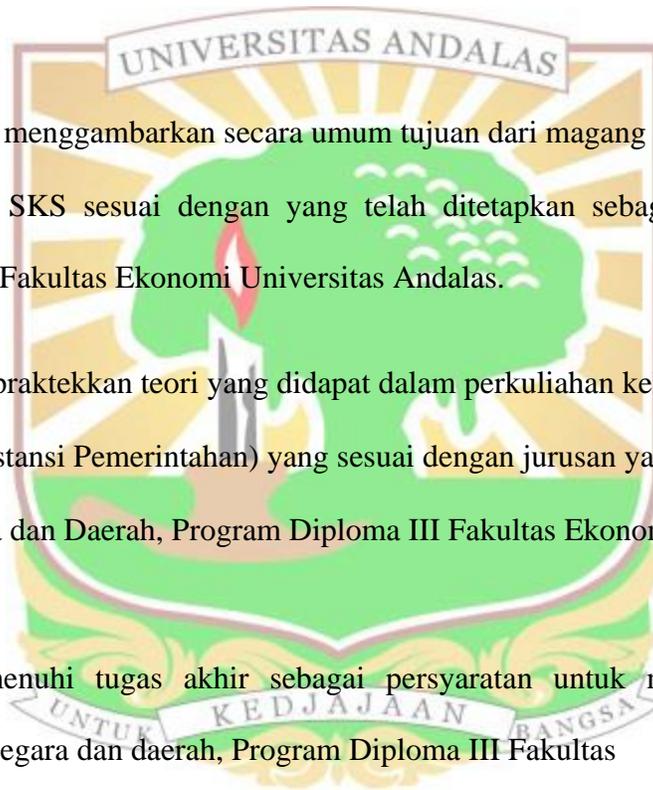
1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan magang terbagi dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum menggambarkan secara umum tujuan dari magang yaitu :

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekkan teori yang didapat dalam perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintahan) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Unversitas Andalas
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- d. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
- e. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta memiliki presepsi, wawasan dan motivasi tinggi terhadap peranannya di masa depan.

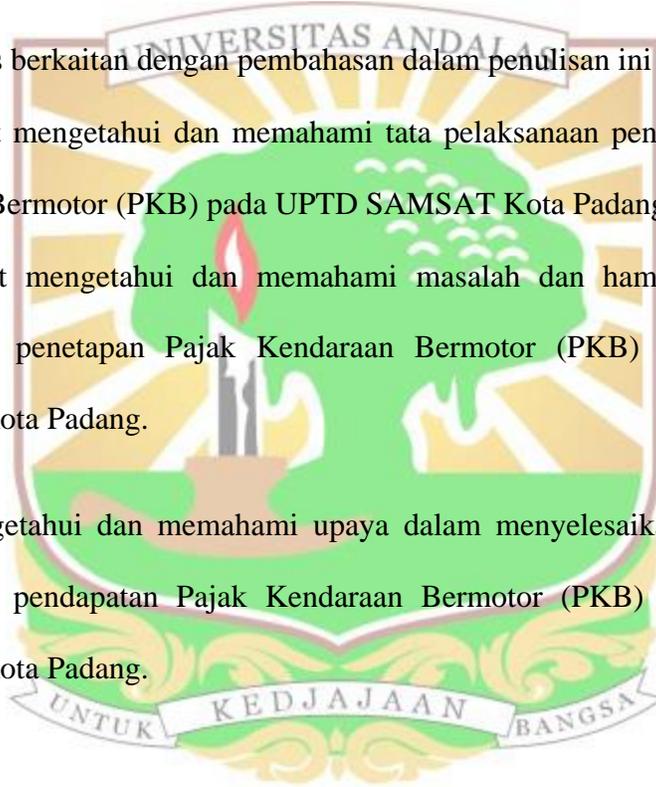


- f. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkungan hidup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- g. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami tata pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami masalah dan hambatan dalam pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.



1.4 Manfaat Magang

Pembahasan ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang perencanaan pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang.
- c. Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang.

2. Bagi Universitas

Terjalannya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas dengan dinas / perusahaan tempat magang. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga akan dikenal di dunia industri kerja.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori, berisikan tentang apa saja teori yang bersangkutan tentang pelaksanaan penetapan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.

BAB III Gambaran umum SAMSAT Kota Padang, serta dasar hukum pembentukan SAMSAT Kota Padang, visi misi tujuan dan sasaran SAMSAT Kota Padang, tugas pokok fungsi dan kewenangan SAMSAT Kota Padang, dan struktur organisasi SAMSAT Kota Padang.

BAB IV Merupakan BAB pengkajian hasil pembahasan lebih lanjut dan permasalahan yang ditemukan.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

